



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 954/02/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran;
- b. menetapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan tugas fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD

KEEMPAT : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini adalah :

- a. membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan sub kegiatan;
- b. mengawasi pelaksanaan sub kegiatan agar sesuai dengan perencanaan kegiatan;

- c. mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan.

- KELIMA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan/ atau PPTK.
- KEENAM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran apabila dibentuk KPA.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK



NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720129 199803 1 010

LAMPIRAN I

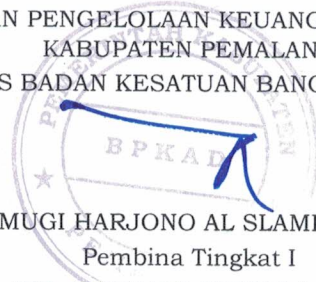
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 954/02/TAHUN 2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN DALAM DINAS
1	EVIE KUSUMANING RAHMAWATI, SE	PENATA TINGKAT I ( III/d )	KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

PLT KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720129 199803 1 010

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 NOMOR : 954 / 07 /TAHUN 2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
 PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PPTK	KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
		KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN	NO	KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BPKAD Kabupaten Pemalang	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.300.000	1	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
						5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	300.000
						5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.000.000
						5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.000.000
						5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	10.000.000
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.442.954.000	6	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.431.504.000
		7			5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.800.000	
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.106.500	9	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.106.500
		5.02.01.2.06						
		5.02.01.2.06	11	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.550.050		
			12	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.350.000		
			13	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000		
			14	5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	88.250.000		
			15	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.097.200		
			16	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.024.000		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.312.000	17	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.312.000

NO	PPTK	KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
		KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN	NO	KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.900.000	18	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	15.900.000
					19	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	685.000.000
					20	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000
					21	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000.000
					22	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	63.700.000
					23	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000
					24	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
					25	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.432.500
						<b>Jumlah</b>	<b>8.229.276.250</b>	
					<b>25</b>			<b>8.229.276.250</b>
2	Kasubbid Perencanaan Anggaran	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	321.000.000	1	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	282.800.000
					2	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	38.200.000
							<b>Jumlah</b>	<b>321.000.000</b>
3	Kasubbid Evaluasi dan Penyusunan Anggaran	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	505.700.000	1	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	250.700.000
					2	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	255.000.000
							<b>Jumlah</b>	<b>505.700.000</b>
					<b>4</b>			<b>826.700.000</b>
4	Kasubbid Belanja Langsung	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	119.100.000	1	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	60.500.000

NO	PPTK	KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
		KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN	NO	KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
					2	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	58.600.000
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	403.983.801.700	3	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	385.591.323.700
					4	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000
					5	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.392.478.000
			<b>Jumlah</b>	<b>404.102.901.700</b>			<b>Jumlah</b>	<b>404.102.901.700</b>
5	Kasubid Belanja Tidak Langsung	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	292.400.000	1	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	149.550.000
					2	5.02.02.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )	142.850.000
			<b>Jumlah</b>	<b>292.400.000</b>			<b>Jumlah</b>	<b>292.400.000</b>
			<b>Jumlah anggaran yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan</b>	<b>404.395.301.700</b>	<b>7</b>			<b>404.395.301.700</b>
6	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	429.400.000	1	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.800.000
					2	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	77.000.000
					3	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	341.600.000
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	159.500.000	4	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	77.700.000

NO	PPTK	KEGIATAN			NO	SUB KEGIATAN		
		KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN		KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN
					5	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemada Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	81.800.000
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		6	5.02.03.2.01.07	Pengamanan BMD	1.315.480.000
					7	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	275.000.000
					8	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan BMD	47.000.000
							<b>Jumlah</b>	<b>2.226.380.000</b>
		<b>Jumlah anggaran yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah====&gt;</b>			8			<b>2.226.380.000</b>
		<b>Jumlah Anggaran dan Jumlah Sub Kegiatan yang dikelola oleh BPKAD Tahun 2023</b>			44			<b>415.677.657.950</b>

PLT KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NUR AJI MUGI HARJONO A. SLAMET, S.Hut, M.E  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720129 199803 1 010